



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI RABU, 5 AGUSTUS 2026



RINGKASAN BERITA HARI INI

Bupati Sidoarjo Perkuat Sinergi dengan PD Muhammadiyah

Bahas Hibah hingga Legalitas Aset Wakaf

Sidoarjo, Memorandum

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperkuat sinergi dengan Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Sidoarjo melalui kegiatan silaturahmi dan dialog, Senin (3/8).

Pertemuan itu membahas berbagai program strategis yang berkaitan dengan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan aset wakaf. Bupati Sidoarjo Subandi memimpin langsung rombongan yang terdiri atas jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Inspektorat, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Kunjungan itu bertujuan memperkuat hubungan sekaligus menyelaraskan program pemerintah daerah

dengan organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi mengenai langkah-langkah kolaboratif yang diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai program keumatan dan kemasyarakatan yang dijalankan Muhammadiyah.

Subandi mengatakan dukungan pemerintah tidak hanya diwujudkan melalui bantuan keuangan, tetapi juga melalui

penyediaan fasilitas publik yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, tata kelola yang baik menjadi kunci agar setiap program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

"Pemerintah daerah berada pada posisi mendukung dan mempermudah. Kita ingin seluruh proses perizinan, pengelolaan aset wakaf, hingga hibah berjalan terang benderang dan berdampak nyata bagi warga," ujar Subandi.

la menambahkan, Pemkab Sidoarjo berkomitmen memberikan kemudahan dalam berbagai aspek pelayanan publik, termasuk percepatan proses administrasi bagi lembaga pendidikan, rumah ibadah, maupun fasilitas sosial yang dikelola Muhammadiyah.

Sementara itu, Ketua PD



Bupati Sidoarjo Subandi silaturahmi ke PD Muhammadiyah.

Muhammadiyah Sidoarjo A. Dzo'ul Milal menilai komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan menjadi faktor penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik yang dihadapi masyarakat.

"Prinsipnya sederhana. Persatuan merupakan fondasi paling dasar dari setiap pencapaian positif. Apabila koordinasi antara Pemkab Sidoarjo dan Muhammadiyah berjalan baik, berbagai persoalan publik akan lebih mudah kita selesaikan

bersama," katanya.

Dalam dialog tersebut, sejumlah isu strategis turut menjadi pembahasan. Di antaranya penyelarasan penyaluran hibah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dengan pendampingan Inspektorat untuk memastikan akuntabilitas administrasi dan kepastian hukum.

Selain itu, pemerintah juga membahas penerbitan perizinan operasional sekolah dan rumah ibadah berbasis digital, pemberian fasilitas terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk fasilitas sosial, serta percepatan legalitas aset wakaf melalui pendampingan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pembahasan lainnya mencakup penguatan layanan kesehatan melalui dukungan terha-

dap program Universal Health Coverage (UHC), pengembangan sarana kesehatan milik Muhammadiyah, hingga integrasi sistem perizinan berbasis digital. Sistem tersebut diharapkan mampu memangkas birokrasi sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memantau proses pengajuan perizinan secara transparan.

Melalui silaturahmi ini, Pemkab Sidoarjo dan PD Muhammadiyah sepakat terus memperkuat koordinasi dalam mendukung pembangunan daerah. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Sidoarjo. (*)/fda

Pemkab Percepat Penanganan Sampah Sungai di Sukodono

SIDOARJO (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyiapkan solusi jangka pendek dan menengah untuk mengatasi penumpukan sampah di aliran sungai Kecamatan Sukodono melalui pemasangan jaring, normalisasi saluran, dan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayan menyatakan, langkah tersebut disepakati dalam audiensi di Sidoarjo, Senin, bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Camat Sukodono, dan para kepala desa sebagai tindak lanjut masih ditemukannya tumpukan sampah di sejumlah sungai.

"Persoalan sampah di Kecamatan Sukodono tidak bisa diselesaikan dengan membersihkan sungai saja, yang harus kita benahi adalah sistemnya, mulai dari penanganan di hulu hingga pengolahan sampah di

tingkat desa agar tidak lagi dibuang ke sungai," kata Mimik.

Menurutnya, enam desa yang menjadi perhatian karena memiliki penumpukan sampah terbanyak di aliran sungai yakni Desa Jogasari, Cangkringsari, Pademonegoro, Pekurungan, Suruh, dan Jumptrejo.

Sebagai solusi jangka pendek, Mimik menjelaskan pemerintah akan memasang jaring pada titik intake atau saluran pengambilan air baku di masing-masing desa untuk menahan sampah yang terbawa arus sungai.

Sampah yang tertahan pada jaring, kata Mimik, akan diangkat secara berkala melalui koordinasi antara pemerintah desa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA), sementara PUBMSDA juga melakukan normalisasi saluran agar aliran sungai kembali lancar.

Menurut dia, Pemkab Sidoarjo juga mendorong pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) sebagai solusi jangka menengah agar sampah dapat diolah sejak dari sumber sehingga hanya residu yang dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

la menuturkan, Kecamatan Sukodono merupakan salah satu kawasan dengan pertumbuhan penduduk dan perumahan yang pesat sehingga volume sampah terus meningkat dan memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pengelolaannya.

Dirinya menambahkan, pembersihan sungai yang selama ini dilakukan secara rutin belum mampu menghentikan munculnya kembali tumpukan sampah sehingga perubahan perilaku masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai menjadi kunci penyelesaian persoalan. (udi)



DIBAKAR: Petugas membakar sisa-sisa material bangunan lapak di eks Lokalisasi Krengseng di Kecamatan Krian, Sidoarjo, Senin (3/8). Pemkab Sidoarjo membongkar 21 lapak di kawasan tersebut, sebagai bagian dari penataan kawasan untuk mengembalikan fungsi lahan sekaligus menegaskan ketertiban umum.

21 Lapak eks Lokalisasi Dibongkar, Pulihkan Fungsi Lahan

SIDOARJO (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo membongkar 21 lapak di kawasan eks Lokalisasi Krengseng di Kecamatan Krian, sebagai bagian dari penataan kawasan untuk mengembalikan fungsi lahan sekaligus menegaskan ketertiban umum.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Sidoarjo R. Novianto dalam keterangan diterima di Sidoarjo, Senin, mengatakan pembongkaran dilakukan sebagai tahapan akhir setelah pemerintah menyampaikan pemberitahuan, sosialisasi, serta memberikan kesempatan kepada pemilik bangunan untuk membongkar lapak secara mandiri.

"Operasi tersebut melibatkan 125 personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo, Kepolisian Sektor (Polsek) Krian, Komando Rayon Militer (Koramil) Krian, Kecamatan Krian, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA), serta PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya," kata Novianto.

Menurutnya, sebelum pembongkaran seluruh personel mengikuti apel sebagai bentuk konsolidasi pelaksanaan operasi untuk memastikan penertiban berlangsung aman, tertib, dan sesuai prosedur.

la menjelaskan, petugas kemudian merobohkan 21 lapak terkait menggunakan

alat pembongkaran, sementara personel gabungan mengamankan lokasi sehingga proses penertiban berlangsung tanpa perlawanan.

Dikatakannya, setelah seluruh bangunan sasaran berhasil diratakan, petugas kemudian memusnahkan sisa tenda dan material yang mudah terbakar agar tidak dimanfaatkan kembali sebelum seluruh personel melaksanakan konsolidasi penutup.

Menurutnya, Pemkab Sidoarjo menegaskan penataan eks Lokalisasi Krengseng bertujuan mengembalikan fungsi kawasan, menekan berbagai penyakit masyarakat, serta mendukung upaya pencegahan penyebaran Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS) dan persoalan sosial lainnya.

Pemerintah daerah juga menegaskan penataan kawasan akan terus dilanjutkan melalui penegakan aturan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin maupun yang tidak sesuai dengan tata ruang sehingga lingkungan menjadi lebih tertib, aman, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menegakkan peraturan perundang-undangan, menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menata kawasan agar kembali sesuai dengan peruntukannya," kata Novianto. (udi)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Jumlah Pencari Kerja di Sidoarjo Tembus 76 Ribu, Fakta TPT Mengejutkan Tembus Tertinggi Se-Jatim



Sidoarjo, Ruang.co.id – Kabupaten Sidoarjo kembali mencatat angka mengejutkan. Sebanyak 76.063 jiwa resmi tercatat sebagai pengangguran terbuka. Data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) mencatat, total angkatan kerja Sidoarjo mencapai 1.172.557 jiwa. Dari jumlah itu, 1.096.494 jiwa berhasil bekerja. Namun, beban pencari kerja tetap tinggi. Sidoarjo memikul angka terbesar di Jawa Timur. Data kita mencatat sebanyak 71.459 pencari kerja aktif di tahun 2023. Sedangkan di tahun yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sempat menyentuh 8,05 persen, dan menempati peringkat tertinggi se-Jatim. Meski begitu, tren menurun terlihat jelas. TPT Sidoarjo turun ke 6,49 persen pada 2024, dan kini 5,75 persen hingga Agustus 2025 yang masih peringkat tertinggi se-Jatim. Namun untuk selama tahun 2026, BPS belum menorehkan jumlah angka TPT dan persentasenya. Fenomena pengangguran terpelajar mendominasi dan bervariasi. Sarjana menyumbang angka tertinggi, 25,10 persen pengangguran. Banyak lulusan menunggu lowongan, sesuai kriteria keinginan dan harapannya. SMK menyumbang 24,20 persen pengangguran. Mismatch kurikulum dengan kebutuhan industri modern menjadi penyebab utama. SMA umum menyumbang 22,40 persen. Minimnya keahlian terapan siap pakai membuat mereka sulit terserap. Sementara lulusan SD ke bawah justru lebih cepat terserap sektor informal. Data menunjukkan, keterbatasan ekonomi memaksa mereka bekerja apa saja. Regulasi terkait ketenagakerjaan diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU ini menegaskan hak warga atas pekerjaan layak dan merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikannya. Terkorelasi dengan hal tersebut, BPS juga mencatat data makro terbaru. IPM Sidoarjo mencapai 83,35 poin, status sangat tinggi. Pertumbuhan ekonomi melaju 5,63 persen. Industri manufaktur menyumbang 48,57 persen PDRB. Penyerapan tenaga kerja terbesar berasal dari lulusan SMK. Namun, persaingan lulusan sarjana tetap ketat. Lantaran pasar kerja lokal belum mampu menampung semua tenaga akademis. Fakta ini membuktikan tantangan serius bagi Sidoarjo. Urbanisasi dan ekspansi industri, belum sepenuhnya menjawab ketimpangan pasar kerja.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Wabup Sidoarjo Apresiasi UMKM Herbal Teh Daun Kumis Kucing.



Sidoarjo, centralberitanews.com – UMKM herbal teh daun kumis kucing di Dusun Girang, Desa Wonokupang, Kecamatan Balongbendo, menarik perhatian Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana. Dengan khasiatnya yang tinggi, ia berharap produk herbal itu dapat dikembangkan. Selasa (4/8) pagi, Wabup Mimik melihat langsung proses pembuatan herbal teh daun kumis kucing. Herwanto, pemilik produk Herbaroso teh daun kumis kucing itu, juga mengajaknya untuk ikut memanen daun kumis kucing. Herwanto menanam tumbuhan kumis kucing di lahan seluas 500 meter persegi. Sejak setahun lalu, pria yang juga seorang anggota TNI AL aktif itu mulai menanamnya dengan memanfaatkan lahan tidak produktif. Wabup Mimik mengapresiasi jerih payah Herwanto yang mampu membuat produk herbal teh daun kumis kucing. Menurutnya, produk Herbaroso akan menjadi produk UMKM herbal yang banyak diminati masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat dapat juga menanam tanaman herbal tumbuhan kumis kucing. “Tanaman Toga itu sebenarnya banyak sekali, tetapi kita mulai dengan tanaman kumis kucing. Ini adalah salah satu contohnya, dengan menanam tanaman kumis kucing bisa menghasilkan uang. Perputaran perekonomian di desa ini Insya Allah akan lebih cepat,” ucapnya. Ia berharap Desa Wonokupang dapat menjadi percontohan desa dengan produk UMKM herbal. Lahan-lahan yang tidak produktif dapat dimanfaatkan untuk menanam tumbuhan kumis kucing. Ia melihat banyak sekali lahan-lahan di desa yang tidak produktif. “Ini harus kita kembangkan dan ini udah ada salah satu contohnya. Ayo ben desadesa liyane melok-melok. Karena di desa itu banyak sekali lahan-lahan yang tidak berfungsi. Nah ayo dimanfaatkan,” ajaknya. Wabup mengakui tumbuhan kumis kucing sudah terbukti berkhasiat bagi kesehatan. Pemanfaatannya pun sangat mudah. Cukup dengan menyeduh daunnya, manfaat tumbuhan kumis kucing dapat langsung dirasakan. “Manfaat tumbuhan kumis kucing ini sangat bagus sekali bagi kesehatan, murah meriah, cukup diseduh, khasiatnya langsung topcer,” ujarnya. Herwanto mengatakan, ide pembuatan teh daun kumis kucing berawal dari keprihatinannya pada kenaikan kasus pasien gagal ginjal di Indonesia. Data dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kasus gagal ginjal di Indonesia melonjak hingga ratusan persen. Berlatar belakang tenaga kesehatan TNI Angkatan Laut, Herwanto tergugah. Ia mulai menanam tumbuhan kumis kucing. “Pada tahun 2025 Menteri Kesehatan menyatakan seperti itu. Saya seorang nakes, jadi saya harus berupaya menolong masyarakat walaupun tanpa dukungan siapapun. Karena saya dulu pernah disumpah untuk membantu masyarakat, menolong masyarakat. Terciptalah ini karena teh kumis kucing ini komposisinya nomor satu untuk ginjal,” paparnya. Herwanto menuturkan, mengawali budidaya tumbuhan kumis kucing tidaklah mudah. Bibit tumbuhan asli Indonesia itu sulit sekali didapatkannya. Namun, dengan tekad untuk menolong masyarakat, akhirnya ia berhasil membudidayakan tumbuhan kumis kucing. Dari lahan pekarangan rumah miliknya, ia berhasil memanen ratusan kilo daun kumis kucing yang siap diolah menjadi daun teh. “Jadi lahan yang saya punya ini adalah lahan pekarangan rumah. Di lahan tidur yang nggak produktif saya jadikan produktif. Saya tanam tumbuhan kumis kucing ini karena sangat bermanfaat bagi kesehatan terutama kesehatan ginjal,” katanya.



Herwanto mengatakan, tanaman kumis kucing merupakan tanaman unggulan Indonesia. Banyak sekali manfaatnya. Selain untuk kesehatan ginjal, dapat juga untuk mengobati hipertensi, gula darah, maupun asam urat dan rematik. Menurutnya, merawat tanaman kumis kucing sangat mudah. Bahkan, bisa dibilang minim perawatan. Cukup dikasih pupuk, tanaman kumis kucing dapat tumbuh subur. Tidak perlu obat-obatan pestisida karena tanaman kumis kucing antihama. Masa panennya pun cukup singkat. Tanaman kumis kucing dapat dipanen dalam 1,5 bulan sejak ditanam. Lalu, dapat dipanen lagi dalam periode yang sama selama tiga tahun masa produktivitasnya. “Kalau tanaman kumis kucing aman sekali dari hama apapun. Coba dilihat daunnya, ada yang bolong nggak? Ini tanpa pestisida, tanpa semprot. Kita rawat saja dengan menyiram air dan kita cabut rumputnya,” jelasnya. Herwanto mengungkapkan, saat ini ada sekitar sepuluh orang petani tanaman kumis kucing yang menjadi mitranya. Dari para petani tersebut, ia mengumpulkan 700–800 kg daun kumis kucing setiap bulan. Harga daun basah yang sudah tercacah Rp 3 ribu per kg. Ia mengatakan, kebutuhan tanaman kumis kucing untuk produk tehnya masih cukup besar. Karena itu, dirinya siap menampung tanaman kumis kucing dari para petan. lainnya. “Daripada nandur yang lain mending nandur tanaman kumis kucing, karena tidak ada yang namanya hama. Masa produktivitasnya dua sampai tiga tahun ke depan. Semisal modal pertama itu bisa kembali antara setengah sampai 1 tahun, 2 tahun selanjutnya adalah untung sampeyan. Berapa per kilo? Tiga ribu rupiah. Langsung potong, kirim 7ke rumah saya,” ujarnya. Git. (@.prm).





Penjualan Telur Lesu, Peternak Kampung Bebek Bertahan

■ Di Tengah Turunnya Daya Beli

KOTA-Aktivitas di Kampung Bebek, RT 05/RW 01, Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Sidoarjo, tak lagi seramai sebelum pandemi Covid-19. Para peternak telur

bebek masih harus berjuang mempertahankan usahanya di tengah melemahnya daya beli masyarakat yang berdampak pada penurunan penjualan. Meski demikian, mereka memilih bertahan sembari terus menjaga kualitas produk. Salah satu peternak, Sulaiman, mengaku penurunan

penjualan mulai dirasakan sejak pandemi dan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda pulih seperti sebelumnya. Permintaan pasar masih jauh di bawah kondisi sebelum Covid-19. "Setelah pandemi sampai sekarang, pertumbuhan usahanya lambat sekali karena

penjualan belum bisa mengejar angka seperti dulu," ujar Sulaiman, Senin (3/8). Saat ini, ia lebih banyak mengandalkan pelanggan tetap yang datang langsung ke rumahnya. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik, Sulaiman memilih tetap menjalankan

kan usahanya daripada menyerah pada keadaan. "Kondisi sekarang memang serba berat. Daya beli turun, tapi kami yang usaha kecil tidak boleh ikut menyerah. Yang penting usaha tetap jalan dan kualitas produk tetap terjaga," katanya.

● Ke Halaman 10



Penjualan Telur Lesu,...

Sulaiman mengenang masa sebelum pandemi sebagai periode paling ramai bagi usahanya. Saat musim liburan, permintaan dari kawasan wisata Nongko Jajar, Kabupaten Pasuruan, bisa mencapai sekitar 800 butir telur setiap pekan. Kini, permintaan dari

kawasan wisata maupun luar daerah mengalami penurunan sehingga penjualan ikut terdampak.

Dari sekitar 400 ekor bebek yang dipeliharanya, Sulaiman mampu menghasilkan rata-rata 260 butir telur setiap hari. Agar seluruh hasil produksi tetap terserap pasar, ia menyediakan beberapa pilihan produk dengan harga yang disesu-

aikan. Variasi harga telur lesu per 1 kg berkisar di Rp3.800. Untuk memilih telur yang bagus, pembeli perlu memperhatikan beberapa hal, seperti tegi dan beratnya agar j



SAPU BERSIH 21 LAPAK DI EKS LOKALISASI KRENGSENG DIRATAKAN, PEMKAB TUNTASKAN PENATAAN KAWASAN

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Penataan kawasan eks Lokalisasi Krengseng di Kecamatan Krian memasuki babak baru. Senin (3/8), Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menurunkan ratusan personel gabungan untuk membongkar bangunan liar yang masih berdiri di kawasan tersebut. Sebanyak 21 lapak warung diratakan sebagai bagian dari upaya mengembalikan fungsi kawasan sekaligus menegakkan ketertiban umum.

Sejak pagi, sekitar pukul 09.35 WIB, sebanyak 125 personel gabungan berkumpul di lokasi. Mereka terdiri atas anggota Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Polsek Krian, Koramil Krian, Kecamatan Krian, Dinas Perhubungan, Dinas PUBMSDA, hingga personel PT KAI Daop 8 Surabaya. Operasi dipimpin langsung Kasatpol PP Kabupaten Sidoarjo Drs. Yany Setyawan.

Sebelum pembongkaran dimulai, seluruh personel mengikuti apel yang dipimpin Plt Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tibumtranmas) Satpol PP Sidoarjo, R. Novianto. Dalam arahnya, ia menegaskan bahwa penertiban tersebut bukan tindakan mendadak, melainkan merupakan tahapan akhir dari proses yang telah berlangsung sebelumnya.

Menurutnya, pemerintah telah memberikan surat pemberitahuan kepada pemilik bangunan, melakukan sosialisasi, hingga memberi kesempatan agar bangunan dibongkar secara mandiri. Karena masih terdapat bangunan yang tersisa, pembongkaran akhirnya dilakukan oleh tim gabungan.

"Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menegakkan

peraturan perundang-undangan, menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menata kawasan agar kembali sesuai dengan peruntukannya," ujar Novianto saat apel.

Ia menambahkan, penataan kawasan Krengseng tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan. Pemerintah juga ingin menghilangkan berbagai aktivitas yang selama ini dianggap menjadi sumber penyakit masyarakat.

Menurutnya, penertiban tersebut diharapkan mampu mendukung langkah pemerintah dalam mencegah penyebaran HIV/AIDS serta berbagai persoalan sosial lain yang selama ini melekat dengan kawasan eks lokalisasi tersebut. Usai apel, petugas langsung bergerak menuju titik-titik bangunan yang masih berdiri. Alat pembongkaran mulai bekerja merobohkan sisa bangunan

yang sebelumnya telah dibongkar sebagian oleh pemilik maupun penghuni.

Proses pembongkaran berlangsung tanpa perlawanan. Personel gabungan mengamankan lokasi selama proses berlangsung sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan tertib dan lancar.

Sekitar pukul 11.15 WIB, seluruh bangunan yang menjadi sasaran berhasil diratakan. Setelah dipastikan tidak ada lagi bangunan yang berdiri, sisa tenda dan material yang mudah terbakar dimusnahkan dengan cara dibakar agar tidak kembali dimanfaatkan.

Operasi berakhir sekitar pukul 12.00 WIB. Seluruh personel kemudian melakukan konsolidasi sebelum meninggalkan lokasi. Selama kegiatan berlangsung situasi tetap aman, kondusif, dan terkendali. (Khol/Dy)



CS
diunduh dengan Canva.com

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



BOLONG:
Luh Erni,
warga Desa
Sidokepung,
Buduran,
menunjukkan
plafon
rumahnya yang
rusak parah.

Atap Rumah di Buduran Ambruk gara-gara Kayu Sudah Lapuk

Penghuni Alami
Luka-Luka

SIDOARJO - Musibah menimpa Luh Erni, warga Desa Sidokepung, Buduran, Senin (3/8). Perempuan berusia 51 tahun itu nyaris kehilangan nyawa setelah atap dan plafon rumahnya ambruk saat dirinya masih beristirahat. Dia mengalami luka robek di bagian pelipis akibat tertimpa reruntuhan. Peristiwa itu terjadi sekitar

pukul 06.00. Saat itu, Erni tengah berbaring di ruang tamu rumahnya. Tiba-tiba dia mendengar suara dari bagian plafon. "Awalnya seperti suara tikus berlarian di atas plafon," ujarnya.

Tak lama berselang, plafon dan rangka atap ruang tamu ambruk. Reruntuhan kemudian disusul ambrolnya bagian depan rumah hingga teras. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu langsung bergegas memberikan pertolongan. Erni

berhasil dievakuasi dari timbunan material dan mendapat penanganan awal dari bidan yang tinggal di sebelah rumahnya.

Kepala Pelaksana BPBD Sidoarjo Sabino Mariano mengatakan, pihaknya sudah menyalurkan terpal sebagai penutup sementara bagian rumah yang rusak. Petugas membawa peralatan kebersihan untuk membantu proses penanganan awal. "Rumah yang roboh ditutup terpal sementara," kata Sabino. (eza/hen)

Jawa Pos

Pendekatan Edukatif untuk Bulan Imunisasi Anak Sekolah

JAKARTA - Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 2026 tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemendagri) juga berperan memperkuat pelaksanaan program tersebut melalui sekolah, madrasah, hingga pesantren.

Direktur Imunisasi Kemenkes Indri Yogyaswari mengatakan, BIAS menjadi strategi pemerintah melindungi anak sekolah dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Program ini digelar dua kali dalam setahun, yakni Agustus dan November. Pada Agustus, pemerintah memberikan vaksin campak-rubela (MR) bagi siswa kelas 1 SD, serta vaksin Human Papillomavirus (HPV) untuk siswa kelas 5. Sementara pada November diberikan vaksin difteri-tetanus (DT) bagi siswa kelas 1 dan vaksin tetanus-difteri (Td) bagi siswa kelas 2 dan kelas 5.

Indri mengingatkan pentingnya BIAS, karena masih ditemukan



ANDRI SAPUTRA/ANTARA FOTO

nyakus campak, difteri, tetanus, hingga ancaman kanker leher rahim akibat infeksi HPV. "Vaksin HPV penting karena sekitar 99 persen kasus kanker serviks disebabkan infeksi Human Papillomavirus. Pemerintah pun menyediakan vaksin tersebut secara gratis bagi sasaran BIAS," tutur Indri.

Ketua Tim Kerja Program Pembinaan Peserta Didik dan Penguatan Pendidikan Karakter Kemendikdasmen Minhajul Ngabidin mengatakan, kesehatan kini menjadi salah satu dimensi profil lulusan yang secara eksplisit masuk dalam tujuan pendidikan nasional. Ka-

rena itu, sekolah wajib mendukung pelaksanaan imunisasi melalui penguatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Gerakan Sekolah Sehat (GSS). "Kesehatan menjadi salah satu modal utama untuk menyiapkan generasi Indonesia Emas. Karena itu sekolah tidak hanya

BUTUH ANTIBODI: Petugas puskesmas menyuntikkan vaksin kepada siswa saat kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) di SD Negeri 1 Ternate, Maluku Utara, Senin (3/8).

memberikan layanan pendidikan, tetapi juga wajib mendukung pelayanan kesehatan, termasuk imunisasi," ujarnya.

Kemendikdasmen juga menginstruksikan dinas pendidikan, sekolah, serta balai pendidikan di seluruh provinsi untuk mendukung pelaksanaan BIAS bersama puskesmas dan dinas kesehatan setempat. Minhajul mengakui masih terdapat kelompok orang tua yang menolak imunisasi. "Pendekatan edukatif jauh lebih efektif dibandingkan pemaksaan," timpalnya.

Dia mengatakan sekolah perlu terlebih dahulu memahami alasan penolakan. Jika berkaitan dengan aspek medis, sekolah dapat melibatkan tenaga kesehatan. Sementara apabila alasan penolakan didasari pertimbangan agama, sekolah sebaiknya menggandeng tokoh agama setempat. (lyn/bas)

Jawa Pos

Ulat Bulu Serang Rumah dan Sekolah di Pucanganom

Aktivitas Belajar Terganggu, Siswa Gatal-Gatal

SIDOARJO – Serangan ulat bulu meresahkan warga RT 01/RW01, Kelurahan Pucanganom, Kecamatan Sidoarjo. Hama tersebut tidak hanya memasuki permukiman warga.

Namun juga mengganggu aktivitas belajar di TK Aisyiyah Bustanul Athfal I Pucanganom.

Sebanyak 35 siswa terdampak akibat kemunculan ulat bulu di lingkungan sekolah. Mereka diawasi ketat selama di sekolah. Gara-gara pintu depan dipenuhi ulat, siswa harus dilewatkan pintu belakang. Dua murid juga mengalami gatal-gatal cukup parah karena serangan ulat.

Kepala TK Aisyiyah Bustanul Athfal I Pucanganom Siti Muhayyarah mengatakan, muncul bentol-bentol pada murid yang mengalami gatal. Mereka lantas diberikan



“Selama ada wabah, aktivitas siswa di luar ruang dibatasi. Kami juga meminta orang tua melapor jika anaknya gatal-gatal.”

Siti Muhayyarah
Kepala TK Aisyiyah Bustanul Athfal I Pucanganom

pengobatan. “Alhamdulillah kondisinya membaik. Gatalnya berkurang,” kata Siti.

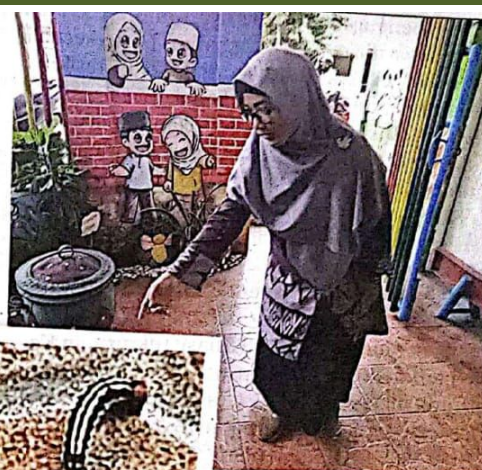
Menurut dia, ulat bulu diduga berasal dari kawasan bekas pabrik di sebelah barat sekolah yang dipenuhi tanaman liar. Hama itu kemudian menyebar hingga memasuki halaman sekolah. “Selama ada wabah, aktivitas siswa di luar ruangan dibatasi. Kami juga meminta orang tua melapor jika anaknya gatal-gatal,” tambah Siti.

Ganggu Aktivitas Warga

Ketua RT 01 RW 01 Kelurahan Pucanganom Elva tak menampik bahwa lingku-

ngan tempat tinggalnya memang sedang diserang ulat bulu. Dia menyebut bahwa rumahnya berkali-kali dimasuki ulat bulu yang diduga berasal dari kawasan eks pabrik tersebut. Bahkan, ulat telah menyebar ke peohonan di sekitar permukiman dan mengganggu aktivitas warga.

“Ulat bergelantungan di seluruh pohon dan merayap di pagar dan trotoar,” katanya. Menindaklanjuti laporan warga, petugas telah melakukan penyemprotan di area sekolah dan permukiman. Selain itu, pohon-



H. SAIFUL ROHMAN/JAWA POS

MERESAHKAN:

Kepala TK Aisyiyah Bustanul Athfal I Pucanganom Siti Muhayyarah menunjukkan ulat bulu yang masuk lingkungan sekolah kemarin (4/8).



pohon yang tumbuh di kawasan eks pabrik juga ditebang untuk mengurangi penyebaran ulat bulu.

Minta Masyarakat Waspada

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian (Dispaperta) Sidoarjo, Eni Rustianingsih menjelaskan ledakan populasi ulat bulu dipengaruhi perubahan musim. Suhu udara yang lebih panas

disertai tingkat kelembapan yang sesuai menjadi kondisi ideal bagi telur ulat untuk menetas dan berkembang lebih cepat. “Meski sudah dilakukan penyemprotan, warga dan para guru kami minta tetap waspada,” kata Eni.

Dispaperta akan terus memantau perkembangan di lokasi untuk memastikan populasi ulat bulu menurun sehingga tidak lagi mengganggu aktivitas masyarakat maupun proses belajar mengajar. “Kami akan memantau situasi di kawasan permukiman agar ulat tak semakin menyebar,” pungkaskan Eni. (ful/hen)

Jawa Pos

Dishub Terima Aduan Parkir Liar di 15 Titik

SIDOARJO – Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo mencatat sedikitnya ada 15 titik parkir liar yang dikeluhkan masyarakat karena mengganggu kelancaran lalu lintas. Itu didasarkan aduan yang masuk ke petugas. Penertiban titik-titik tersebut bakal digelar bertahap.

Kepala UPT Parkir Dishub Sidoarjo Fajar Rusdiono mengatakan, kawasan Simpang Babalayar menjadi salah satu titik yang paling banyak diadukan warga. Kendaraan yang parkir di



PENERTIBAN: Petugas dishub menegur jukir liar yang menarik uang di Simpang 4 Babalayar, Senin (3/8) malam.

tepi jalan membuat badan jalan menyempit sehingga arus lalu lintas, terutama

kendaraan yang hendak belok kiri, sering tersendat. "Penindakan diawali dari

kawasan Simpang Babalayar. Tepatnya depan Mie Gacoan Magersari," kata Fajar.

Dia mengatakan, petugas telah memberikan teguran kepada pengendara yang memarkir kendaraannya di lokasi tersebut. Dishub juga menegaskan ruas jalan di depan kawasan itu merupakan area bebas parkir sehingga kendaraan harus masuk ke area parkir yang telah disediakan.

Menurut Fajar, penertiban tidak berhenti di Magersari. Seluruh titik yang menjadi lokasi parkir liar akan diter-

tikkan. Semisal di sebelah selatan Delta Artha. Seharusnya, kawasan tersebut merupakan area bebas parkir.

Terkait parkir liar, Fajar mengimbau masyarakat agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tidak memarkir kendaraan di bahu jalan. Selain mengganggu kelancaran arus lalu lintas, parkir liar juga berpotensi membahayakan pengguna jalan. Masyarakat juga diminta terus melaporkan pelanggaran parkir agar dapat segera ditindaklanjuti petugas. (ful/hen)

Jawa Pos



DIBAKAR: Petugas membakar sisa-sisa material bangunan lapak di eks Lokalisasi Krengseng di Kecamatan Krian, Sidoarjo, Senin (3/8). Pemkab Sidoarjo membongkar 21 lapak di kawasan tersebut, sebagai bagian dari penataan kawasan untuk mengembalikan fungsi lahan sekaligus menegakkan ketertiban umum. BM/ST

21 Lapak eks Lokalisasi Dibongkar, Pulihkan Fungsi Lahan

SIDOARJO (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo membongkar 21 lapak di kawasan eks Lokalisasi Krengseng di Kecamatan Krian, sebagai bagian dari penataan kawasan untuk mengembalikan fungsi lahan sekaligus menegakkan ketertiban umum.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Sidoarjo R. Novianto dalam keterangan diterima di Sidoarjo, Senin, mengatakan pembongkaran dilakukan sebagai tahapan akhir setelah pemerintah menyampaikan pemberitahuan, sosialisasi, serta memberikan kesempatan kepada pemilik bangunan untuk membongkar lapak secara mandiri.

"Operasi tersebut melibatkan 125 personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo, Kepolisian Sektor (Polsek) Krian, Komando Rayon Militer (Koramil) Krian, Kecamatan Krian, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA), serta PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya," kata Novianto.

Menurutnya, sebelum pembongkaran seluruh personel mengikuti apel sebagai bentuk konsolidasi pelaksanaan operasi untuk memastikan penertiban berlangsung aman, tertib, dan sesuai prosedur.

Ia menjelaskan, petugas kemudian merobohkan 21 lapak terkait menggunakan

alat pembongkaran, sementara personel gabungan mengamankan lokasi sehingga proses penertiban berlangsung tanpa perlawanan.

Dikatakannya, setelah seluruh bangunan sasaran berhasil diratakan, petugas kemudian memusnahkan sisa tenda dan material yang mudah terbakar agar tidak dimanfaatkan kembali sebelum seluruh personel melaksanakan konsolidasi penutup.

Menurutnya, Pemkab Sidoarjo menegaskan penataan eks Lokalisasi Krengseng bertujuan mengembalikan fungsi kawasan, menekan berbagai penyakit masyarakat, serta mendukung upaya pencegahan penyebaran Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS) dan persoalan sosial lainnya.

Pemerintah daerah juga menegaskan penataan kawasan akan terus dilanjutkan melalui penegakan aturan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin, maupun yang tidak sesuai dengan tata ruang sehingga lingkungan menjadi lebih tertib, aman, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menegakkan peraturan perundang-undangan, menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menata kawasan agar kembali sesuai dengan peruntukannya," kata Novianto. **(udi)**

Rencana Revisi PP Nomor 109 Tahun 2000 Buka Peluang Kenaikan

Gaji Kepala Daerah Dikaji Komprehensif dan Berbasis Kinerja

DPR RI, Bhirawa

Wacana Mendagri Tito Karnavian untuk merevisi gaji kepala daerah direspon DPR RI dengan meminta kajian komprehensif dengan memperhitungkan kondisi fiskal pemerintah serta kinerja pemerintah daerah.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya, menyebut pemerintah perlu mengkaji secara komprehensif rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang membuka peluang kenaikan gaji kepala daerah.

Menurut Indrajaya, wacana kenaikan gaji tersebut perlu dipertimbangkan secara matang, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang masih dijalankan pemerintah pusat.

"Rencana kenaikan gaji kepala daerah harus dikaji secara mendalam. Kita memahami bahwa PP No-



Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya.

mor 109 Tahun 2000 sudah berlaku selama 26 tahun dan memang layak dievalu-

asi. Namun, pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi fiskal nasional serta prioritas penggunaan anggaran negara," tegas Indrajaya, Selasa (4/8/2026).

Terkait hal ini Indrajaya melanjutkan Fraksi PKB pada prinsipnya tidak mempersoalkan apabila pemerintah memutuskan menaikkan gaji kepala daerah. Namun, kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Kenaikan gaji tidak boleh

dipandang sebagai hak semata, tetapi harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kinerja kepala daerah. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang lebih baik, tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, serta percepatan pembangunan di daerah," ujarnya.

Indrajaya menyatakan bahwa besaran hak keuangan kepala daerah perlu dikaitkan dengan capaian kinerja masing-masing daerah. Dengan demikian, pemerintah dapat

» ke halaman 11

Bhirawa

Gaji Kepala Daerah Dikaji Komprehensif dan Berbasis

● Sambungan hal 1

membangun sistem penghargaan yang adil sekaligus mendorong terciptanya kompetisi positif antar-daerah.

"Kalau ada penyesuaian gaji, maka harus ada parameter yang objektif. Misalnya capaian pembangunan, kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, tingkat kesejahteraan masyarakat, hingga keberhasilan menjalankan program-program nasional, tambahannya.

Selain meningkatkan motivasi kerja, Indrajaya menilai penyesuaian gaji juga dapat menjadi salah satu langkah pencegahan tindak pidana korupsi, meskipun bukan menjadi satu-satunya solusi.

"Kesejahteraan yang memadai dapat memperkecil godaan untuk melakukan penyalahgunaan jabatan. Namun tentu saja harus dibarengi dengan pengawasan yang kuat, transparansi, dan penegakan hukum yang tegas. Jadi, kenaikan gaji bukan jaminan bebas korupsi, tetapi bisa menjadi bagian dari upaya pencegahan," ungkapnya.

Indrajaya menyatakan Komisi II DPR RI siap mengawal proses peng-

kajian revisi PP Nomor 109 Tahun 2000 agar menghasilkan kebijakan yang adil, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Kami siap mengawal pembahasan ini agar melahirkan kebijakan yang tepat. Tujuannya bukan sekadar menaikkan gaji kepala daerah, tetapi menciptakan pemerintahan daerah yang semakin profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil," pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa aturan mengenai hak keuangan atau gaji bagi kepala daerah bakal direvisi atau diformulasikan kembali guna menyesuaikan dengan keadaan saat ini.

Dia menjelaskan bahwa gaji bagi kepala daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000. Artinya, dia mengatakan bahwa aturan itu belum mengalami perubahan selama 26 tahun, sementara kondisi ekonomi saat ini sudah jauh berbeda.

"Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan revisi, tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri

Keuangan sesuai arahan DPR RI di komisi II. Kamis, 4 Agustus 2026.

Meski demikian, revisi ini penting bagi kepala daerah agar sejalan dengan kinerja.

Dia menambahkan, kinerja kepala daerah akan dievaluasi berdasarkan Badan Penyelenggara Pembangunan Nasional (PANRB) dalam menilai kinerja kepala daerah.

Selain itu, Indrajaya juga menilai penting untuk meningkatkan pendapatan daerah jika bisa sejalan dengan beban daerah.

Untuk itu, dia berharap ada keingintahuan untuk meningkatkan motivasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan Penguatan AP, fasilitas publik akan meningkat kualitas pelayanan publik.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Sidoarjo Siapkan Solusi Atasi Sampah Sungai Sukodono

Sidoarjo, Memorandum

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyiapkan langkah konkret untuk mengatasi persoalan tumpukan sampah di aliran sungai Kecamatan Sukodono. Solusi jangka pendek hingga jangka menengah disepakati dalam audiensi yang dipimpin Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana. Audiensi di Ruang Kerja Wakil Bupati Sidoarjo, Senin (3/8), digelar sebagai tindak lanjut masih ditemukannya tumpukan sampah di sejumlah aliran sungai meski pembersihan rutin telah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Audiensi diikuti Dinas Ling-

kungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA), Asisten Perekonomian dan Pembangunan M Bahrul Arif, Camat Sukodono, serta para kepala desa. Enam desa di Kecamatan Sukodono menjadi perhatian karena memiliki tumpukan sampah terbanyak di aliran sungai, yakni Desa Jogosatri, Cangkringsari, Pademonegoro, Pakarungan, Suruh, dan Jemputrejo. Sebagai solusi jangka pendek, akan dilakukan pemasangan jaring pada titik intake (saluran pengambilan air baku) di masing-masing desa untuk mena-

han sampah yang terbawa arus sungai. Sampah yang terkumpul nantinya diangkat secara berkala melalui koordinasi antara pemerintah desa, DLHK, dan PUBMSDA. Selain itu, Dinas PUBMSDA akan melakukan normalisasi saluran agar aliran sungai kembali lancar. Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menegaskan, persoalan sampah tidak cukup diselesaikan hanya dengan membersihkan sungai. Sistem pengelolannya juga harus dibenahi. "Persoalan sampah di Sukodono tidak bisa diselesaikan dengan membersihkan sungai saja.

Yang harus kita benahi adalah sistemnya, mulai dari penanganan di hulu hingga pengolahan sampah di tingkat desa agar tidak lagi dibuang ke sungai," ujarnya. Menurutnya, langkah cepat yang dilakukan saat ini merupakan upaya menekan penumpukan sampah agar tidak menghambat aliran air sekaligus meminimalkan potensi banjir. "Langkah cepat yang kita lakukan adalah memasang jaring di setiap intake sungai dan melakukan normalisasi saluran. Sampah yang tertahan di jaring harus segera diangkat melalui koordinasi antara pemerintah desa, DLHK, dan PUBMSDA," katanya.

Untuk solusi jangka menengah, Pemkab Sidoarjo akan mendorong pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di wilayah tersebut. Keberadaan TPS3R diharapkan mampu mengurangi sampah sejak dari sumber sehingga yang dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) benar-benar hanya sampah residu. "Kita juga menyiapkan solusi jangka menengah dengan mendorong pembangunan TPS3R. Harapannya, sampah dapat diolah dari sumbernya sehingga yang masuk ke TPA benar-benar hanya sampah residu," jelasnya. Mimik mengatakan, Keca-



Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menggelar rapat untuk menyiapkan solusi mengatasi sampah di Sukodono.

matan Sukodono menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan penduduk dan kawasan perumahan yang cukup pesat. Kondisi tersebut turut berdampak pada meningkatnya volume sampah sehingga diperlukan kepedulian seluruh elemen masyarakat.

"Selama ini pemerintah rutin membersihkan sungai, tetapi sampah terus muncul kembali. Artinya, persoalan utamanya bukan hanya pembersihan, melainkan perilaku membuang sampah sembarangan yang harus kita ubah bersama," tegasnya. (jok/ida)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



AUDIENSI: Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi penumpukan sampah di aliran Sungai Sukodono.

Pemkab Siapkan Jaring Sungai dan TPS3R untuk Atasi Gunungan Sampah

PENUMPUKAN sampah di aliran sungai wilayah Kecamatan Sukodono menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Selain menggelar aksi bersih sungai, Pemkab menyiapkan langkah cepat dan solusi jangka menengah agar persoalan sampah yang terus berulang dapat ditangani secara berkelanjutan.

Sedikitnya enam desa menjadi titik prioritas penanganan karena mengalami penumpukan sampah paling parah, yakni Desa Jogosatri, Cangkringsari, Pademonegoro, Pekarungan, Suruh, dan Jumputrejo.

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mengatakan, langkah cepat yang akan dilakukan adalah memasang jaring di setiap titik intake atau saluran pengambilan air baku. Jaring tersebut berfungsi menahan sampah yang terbawa arus agar tidak menyumbat saluran.

“Langkah cepat yang kita lakukan adalah memasang jaring di setiap intake sungai dan melakukan normalisasi saluran. Sampah yang tertahan di jaring harus segera diangkat melalui koordinasi antara

● Ke Halaman 10

CS

RADAR
SIDOARJO.ID

Diperoleh dari: [Perencanaan, Riset, dan Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo](#)

Pemkab Siapkan...

pemerintah desa, DLHK, dan DPUBMSDA,” ujar Mimik.

Selain pemasangan jaring, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) juga akan melakukan normalisasi saluran untuk memperlancar aliran air sekaligus mengurangi potensi banjir.

Pemkab juga menyiapkan solusi

jangka menengah dengan mendorong pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di kawasan tersebut. Menurut Mimik, keberadaan TPS3R menjadi bagian penting dalam pembedahan sistem pengelolaan sampah agar volume sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) semakin berkurang.

“Kami ingin sampah dapat diolah

sejak dari sumbernya, sehingga tidak masuk ke TPA. Perempaan sampah di Mimik itu dengan menggunakan alatnya, perlu kesadaran masyarakat terutama untuk mengurangi sampah tersebut.

CS
Dipindai dengan CamScanner

RADAR
SIDOARJO.ID



Wabup Sidoarjo Hadir Titip Doa di Pengajian Rutin Pondok Jati Agar Tetap Amanah Memimpin Kabupaten Sidoarjo

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana hadir ditengah-tengah jamaah pengajian rutin Qurrota A'yun Sidoarjo di Masjid Nurul Yaqin Perumahan Pondok Jati Sidoarjo, Senin, (3/8). Pengajian yang rutin digelar di Senin pertama setiap bulannya itu diikuti ratusan jamaah perempuan. Kali ini pengurus pengajian rutin Qurrota A'yun Sidoarjo kedatangan K.H. Ahmad Muzakky sebagai penceramahnya. Pengajian yang dikemas dalam bentuk NGOPI (Ngobrol Penuh Ilmu) itu terbuka untuk umum.

Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana bersyukur bisa menghadiri pengajian rutin Qurrota A'yun Sidoarjo. Ia ungkapkan terakhir kali berkumpul dengan jamaah Qurrota A'yun Sidoarjo sebelum

dirinya menjabat wakil bupati Sidoarjo. Oleh karenanya dalam kesempatan kali ini ia titip doa agar dirinya bersama Bupati Sidoarjo H. Subandi tetap amanah memimpin Kabupaten Sidoarjo. Ia yakin dengan doa dari para jamaah pengajian seperti ini dapat membawa Kabupaten Sidoarjo lebih baik lagi.

"Di sini saya nyuwun pandonganipun panjenengan semuanya, supaya saya sebagai wakil bupati dan juga bapak bupati, mohon selalu didoakan supaya menjadi pemimpin yang amanah, bisa membawa Sidoarjo ini lebih baik. Soale ibu-ibu lek duno iku insyaallah tembus langit," ucapnya.

Wabup Hj. Mimik Idayana menyampaikan membangun Kabupaten Sidoarjo harus semaksimal mungkin. Tidak hanya mengandal-

kan APBD namun juga bantuan APBN. Ia pun terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan di Kabupaten Sidoarjo semakin masif. Hasilnya dalam satu tahun ini berbagai pembangunan dapat diwujudkan melalui bantuan APBN. Mulai dari renovasi rumah tidak layak huni, renovasi sekolahan, jembatan, maupun infrastruktur jalan.

"Alhamdulillah satu tahun ini saya berusaha semaksimal mungkin selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dan alhamdulillah kita mendapatkan bantuan yang sangat besar sekali. Mulai dari bantuan renovasi rumah tidak layak huni, renovasi sekolahan, jembatan, maupun infrastruktur jalan yaitu pengecoran jalan di Lingkar Timur, alhamdulillah semuanya disetujui!

Berkat doa panjenengan semuanya," ujarnya.

Dalam kesempatan itu Wabup Hj. Mimik Idayana juga berpesan kepada seluruh jamaah untuk menjaga buah hatinya dari bahaya pergaulan bebas. Ia katakan kasus HIV/AIDS cukup tinggi di Kabupaten Sidoarjo. Ditambah peredaran Narkoba dan Minuman Keras/Miras yang merajalela. Untuk itu sebagai orang tua wajib membentengi putra putrinya agar terhindar dari hal itu. Selain itu ia meminta masyarakat mendukung upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo mencegah penyebaran HIV/AIDS, peredaran Narkoba dan Minuman Keras/Miras. Masyarakat dapat melaporkan adanya kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayahnya. (Khol/Dy)

Pemkab Percepat Penanganan Sampah Sungai di Sukodono

SIDOARJO (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyiapkan solusi jangka pendek dan menengah untuk mengatasi penumpukan sampah di aliran sungai Kecamatan Sukodono melalui pemasangan jaring, normalisasi saluran, dan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana menyatakan, langkah tersebut disepakati dalam audiensi di Sidoarjo, Senin, bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Camat Sukodono, dan para kepala desa sebagai tindak lanjut masih ditemukannya tumpukan sampah di sejumlah sungai.

"Persoalan sampah di Kecamatan Sukodono tidak bisa diselesaikan dengan membersihkan sungai saja, yang harus kita benahi adalah sistemnya, mulai dari penanganan di hulu hingga pengolahan sampah di

tingkat desa agar tidak lagi dibuang ke sungai," kata Mimik.

Menurutnya, enam desa yang menjadi perhatian karena memiliki penumpukan sampah terbanyak di aliran sungai yakni Desa Jogosatri, Cangkringsari, Pademonegoro, Pekarungan, Suruh, dan Jumputrejo.

Sebagai solusi jangka pendek, Mimik menjelaskan pemerintah akan memasang jaring pada titik intake atau saluran pengambilan air baku di masing-masing desa untuk menahan sampah yang terbawa arus sungai.

Sampah yang tertahan pada jaring, kata Mimik, akan diangkut secara berkala melalui koordinasi antara pemerintah desa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA), sementara PUBMSDA juga melakukan normalisasi saluran agar aliran sungai kembali lancar.

Menurut dia, Pemkab Sidoarjo juga mendorong pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) sebagai solusi jangka menengah agar sampah dapat diolah sejak dari sumber sehingga hanya residu yang dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Ia menuturkan, Kecamatan Sukodono merupakan salah satu kawasan dengan pertumbuhan penduduk dan perumahan yang pesat sehingga volume sampah terus meningkat dan memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pengelolaannya.

Dirinya menambahkan, pembersihan sungai yang selama ini dilakukan secara rutin belum mampu menghentikan munculnya kembali tumpukan sampah sehingga perubahan perilaku masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai menjadi kunci penyelesaian persoalan. (udi)



BM/ST



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bupati Sidoarjo Perkuat Sinergi dengan PD Muhammadiyah

Bahas Hibah hingga Legalitas Aset Wakaf

Sidoarjo, Memorandum

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperkuat sinergi dengan Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Sidoarjo melalui kegiatan silaturahmi dan dialog, Senin (3/8).

Pertemuan itu membahas berbagai program strategis yang berkaitan dengan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan aset wakaf.

Bupati Sidoarjo Subandi memimpin langsung rombongan yang terdiri atas jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawain Daerah (BKD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Inspektorat, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Kunjungan itu bertujuan mempererat hubungan sekaligus menyelaraskan program pemerintah daerah

dengan organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi mengenai langkah-langkah kolaboratif yang diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai program keumatan dan kemaslahatan yang dijalankan Muhammadiyah.

Subandi mengatakan dukungan pemerintah tidak hanya diwujudkan melalui bantuan keuangan, tetapi juga melalui

penyediaan fasilitas publik yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, tata kelola yang baik menjadi kunci agar setiap program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

"Pemerintah daerah berada pada posisi mendukung dan mempermudah. Kita ingin seluruh proses perizinan, pengelolaan aset wakaf, hingga hibah berjalan terang benderang dan berdampak nyata bagi warga," ujar Subandi.

Ia menambahkan, Pemkab Sidoarjo berkomitmen memberikan kemudahan dalam berbagai aspek pelayanan publik, termasuk percepatan proses administrasi bagi lembaga pendidikan, rumah ibadah, maupun fasilitas sosial yang dikelola Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua PD



Bupati Sidoarjo Subandi silaturahmi ke PD Muhammadiyah.

Muhammadiyah Sidoarjo A. Dzo'ul Milal menilai komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan menjadi faktor penting dalam menyukseskan berbagai program pelayanan kepada masyarakat.

"Prinsipnya sederhana. Persatuan merupakan fondasi paling dasar dari setiap capaian positif. Apabila koordinasi antara Pemkab Sidoarjo dan Muhammadiyah berjalan cair, berbagai persoalan publik akan lebih mudah kita selesaikan

bersama," katanya.

Dalam dialog tersebut, sejumlah isu strategis turut menjadi pembahasan. Di antaranya penyaluran hibah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dengan pendampingan Inspektorat untuk memastikan akuntabilitas administrasi dan kepastian hukum.

Selain itu, pemerintah juga membahas penyederhanaan perizinan operasional sekolah dan rumah ibadah berbasis digital, pemberian fasilitas terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk fasilitas sosial, serta percepatan legalitas aset wakaf melalui pendampingan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pembahasan lainnya mencakup penguatan layanan kesehatan melalui dukungan terha-

dap program Universal Health Coverage (UHC), pengembangan sarana kesehatan milik Muhammadiyah, hingga integrasi sistem perizinan berbasis digital. Sistem tersebut diharapkan mampu memangkas birokrasi sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memantau proses pengajuan perizinan secara transparan.

Melalui silaturahmi ini, Pemkab Sidoarjo dan PD Muhammadiyah sepakat terus mendukung koordinasi dalam mendukung pembangunan daerah. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Sidoarjo. (*)/fdn





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sampah Menumpuk, Sungai di Enam Desa Tersumbat

SIDOARJO – Tumpukan sampah yang menghambat aliran air sungai di wilayah Sukodono kembali dikeluhkan masyarakat. Warga meminta sampah dibersihkan karena memunculkan bau tak sedap.

Kepala Bidang Pengairan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUB-MSDA) Sidoarjo Prayitno mengatakan, penumpukan sampah tidak hanya meng-

tetapi juga mengurangi daya tampung sungai. Karena itu, pihaknya mengencakan pembersihan di titik-titik yang mengalami penyumbatan. Terutama di enam desa yakni Jogosatru, Cangkringsari, Pademonegoro, Pekarungan, Suruh, dan Jumpitrejo.

Pemkab akan mempercepat pembersihan di titik-titik tersebut. Selain mengangkat sampah yang menyumbat aliran, petugas juga melaku-

kan pengerukan sedimen agar kapasitas sungai kembali normal. "Musim kemarau tepat untuk normalisasi. Debit air rendah memudahkan petugas," kata Prayitno.

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menjelaskan, persoalan sampah di Sukodono tidak cukup diselesaikan dengan hanya membersihkan sungai. Menurutnya sistem pengelolaan sampah juga harus dibenahi agar sampah tidak

terus berakhir di sungai. "Sebagai langkah pertama, kami akan memasang jaring di titik intake sungai untuk menahan sampah yang terbawa arus," ujarnya.

Untuk jangka menengah, Mimik mendorong pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di kawasan tersebut. "Keberadaan TPS3R itu penting untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya," ujarnya. **(ful/hen)**



Sebagai langkah pertama, kami akan memasang jaring di titik intake sungai untuk menahan sampah yang terbawa arus."

Mimik Idayana
Wabup Sidoarjo

Jawa Pos